PRABOWO, SAYA DAPAT LAPORAN

26 Juli 2026

Presiden Prabowo sering katakan "Saya Dapat Laporan ".Saya dapat laporan ,banyak petani sekarang sudah berlibur ke luar negeri . Saya dapat laporan,.dari MBG saja sudah ada satu juta lapangan kerja. Saya dapat laporan,ada 60 juta orang telah makan itu MBG . Saya dapat laporan bertambah tinggi badan anak anak yang makan dari MBG. Saya dapat laporan ,anak anak sekolah sebanyak 54% datang dalam keadaan lapar.

Presiden Prabowo sering katakan"saya dapat laporan".Keadaan APBN kita aman aman saja. Saya dapat laporan bangsa Indonesia paling sejahtera hidupnya di dunia . Dan seterusnya . Presiden sebaiknya melaporkan hasil uji kebenaran dari laporan ABS yang diterimanya. Laporan bawahan seharusnya bukan bahan laporan terhadap rakyat ,tetapi sebagai bahan evaluasi apakah laporan tersebut sudah benar atau belum. Mengapa ?. Karena semua menteri adalah gerombolan para penjilat,yang kerjanya terus berlomba memuaskan atasannya tanpa reserve. Dan bukankah semua laporan dari para pelapor telah menjadi bahan olok olok ?

Prabowo dan Nalar Kritis

Penulis tidak mengerti secara penuh dengan sikap Pak Prabowo yang begitu mudah percaya dengan laporan-laporan bawahannya. Seakan-akan Pak Prabowo bukan seorang yang pernah hidup lama di Indonesia atau kah sekedar yang penting pidato bukan pada seberapa penting isinya. Bagaimana mungkin ketika mendapatkan laporan Presiden tidak melakukan validasi, sehingga dapat membuat opini kedua (second opinion) yang lebih mendekati kenyataan di lapangan.

Misalnya pada kasus upah buruh kupas bawang yang viral sehingga menjadi bahan olok-olokan masyarakat. Lalu dengan berbagai usaha coba untuk diklarfikiasi oleh para anak buahnya seperti Tuan Qodari kepala staf kepresidenan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo slip tongue (salah ucap), dengan berbagai alasan yang dbuat seperti kelelahan akibat pidato yang sangat panjang. Pada saat yang sama, jikalau diteliti lebih jauh, sepertinya memang Pak Prabowo

orangnya sangat mempercayai anak buahnya yang mengatakan upah kupas bawang dihargakan 700 ribu perkilo.

Mengapa penulis berkesimpulan demikian? Harus diingat bahwa pidato kenegaraan setiap tanggal 16 Agustus merupakan pidato laporan Presiden kepada MPR/DPR dan seluruh rakyat Indonesia atas kinerjanya selama setahun. Pidato 16 Agustus merupakan pidato rutin kenegaraan disebut juga siding tahunan MPR/DPR, formal dan resmi, sehingga konsep pidatonya pun tidak biasa, melainkan memang dibuat sedetail mungkin bagi memberikan harapan, memberikan motivasi dan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia mengenai masa depan bangsa Indonesia.

Di samping itu pidato kenegaraan setiap 16 Agustus merupakan pidato protokoler yang harus dilakukan oleh seorang Presiden Indonesia. Apalagi dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Pastinya disetting semegah dan seagung mungkin, sehingga pidatonya harus merupakan refresentasi keberhasilan. Di sinilah konteksnya yang harus dipahami. Bagaimana mungkin pidato kenegaraan yang harus ditampilkan sebagai pidato kemegahan harus mengumumkan pendapatan seorang buruh kupas bawang 700 rupiah. Pastilah Pak Prabowo juga tidak mau mengucapkannya kecuali isi pidato itu memang sesuatu yang besar, hebat dan mewakili “keberhasilannya” dalam memimpin.

Dari analisa terdahulu, memang benar pidato Pak Prabowo di desain demikian. Lalu ketika mengadung logika yang tidak benar, diharapakan masyarakat memakluminya. Pada saat yang sama dapat dilihat betapa dangkal cara Pak Prabowo memproses informasi yang didapatkan dari para bawahannya.

Sama dengan petani yang sudah dikatakan banyak berwisata ke luar negeri. Pernyataan Presiden yang demikian tidak didasarkan pada data kuantitatif, atau setidaknya data yang merefresentasikan. Sekira memang ada petani yang sampai dapat liburan ke luar negeri, petani model apa? Masih sangat tidak jelas. Dengan demikian pidatonya hanya sekedar untuk pidato membangkitkan semangat para petani.

Data menunjukkan NTP =Nilai Tukar Petani memang pada kenyataannya mengalami dinamika naik turun seperti yang diperlihatkan di bawah ini:

Bulan	NTP	Keterangan
Januari	123,60	Turun 1,40 %
Februari	125,45	Naik 1,50 %
Maret	125,24	Turun 0,09 %
April	127,73	Naik 1,99 %
Mei	127.73	Turun 0,06 %
Juni	127,65	Naik 1,05 %
Juli	126,67	
Agustus	129,19	

Sumber: BPS sebagaimana dikutif oleh beberapa media online seperti Validnews.com, harianbasis.co, investor.id, akses tanggal 2 September 2026

Jika memang untuk membangkitkan semangat tentunya juga disertai instrument yang betul-betul dapat diukur, seperti kerpihakan pemerintah kepada petani dengan mendorong harga-harga pupuk dan obat-obatan tanaman dapat dijangkau. Ada program unggulan, bimbingan teknis ataupun studi banding ke Negara-negara yang lebih dahulu unggul di pertanian seperti Thailand dan lain-lain. Di sisi lain juga pemerintah sedapat mungkin harus melakukan intervensi yang sungguh-sungguh kepada para petani. Misalnya dengan adanya reformasi UU agraria agar pertanian dijadikan arus utama kebijakan. Bagaimana pun Indonesia sudah lama dikenal sebagai Negara agraris, tetapi menjadi tujuan impor pangan.

Bulan	NTP	Keterangan
Januari	123,60	Turun 1,40 %
Februari	125,45	Naik 1,50 %
Maret	125,24	Turun 0,09 %
April	127,73	Naik 1,99 %
Mei	127.73	Turun 0,06 %
Juni	127,65	Naik 1,05 %
Juli	126,67	

Agustus	129,19	

Sumber: BPS sebagaimana dikutif oleh beberapa media online seperti Validnews.com, harianbasis.co, investor.id, akses tanggal 2 September 2026

Jika memang untuk membangkitkan semangat tentunya juga disertai instrument yang betul-betul dapat diukur, seperti kerpihakan pemerintah kepada petani dengan mendorong harga-harga pupuk dan obat-obatan tanaman dapat dijangkau. Ada program unggulan, bimbingan teknis ataupun studi banding ke Negara-negara yang lebih dahulu unggul di pertanian seperti Thailand dan lain-lain. Di sisi lain juga pemerintah sedapat mungkin harus melakukan intervensi yang sungguh-sungguh kepada para petani. Misalnya dengan adanya reformasi UU agraria agar pertanian dijadikan arus utama kebijakan. Bagaimana pun Indonesia sudah lama dikenal sebagai Negara agraris, tetapi menjadi tujuan impor pangan.

Tahun	Volume Impor	Nilai	Catatan
2023	2,53 juta ton		Jan-Nov. 2023
2024	3,85 juta ton	US$ 1,91 Miliar	Jan-Nov 2024 naik 52 % dari 2023
2025	364.300 ton	US$ 178,5 juta/Rp 2,97 Triliun	Jan-Okt 2025. Pemerintah "stop impor" sejak 2025

Sumber: BPS sebagaimana dikutif oleh bberapa media online seperti goodstsats.id, validnews.id, scisi.co.id, ekonomi.espos.co.id, badanpangan.go.id

Pada tahun 2026 kebijakan pemerintah RI tidak impor pangan, dikatakan sudah memenuhi swasembada. Hanya saja NTP lebih mencerminkan kemampuan tukar hasil panen vs biaya hidup, bukan langsung ukuran bisa ke luar negeri. Dengan demikian seharusnya setelah semua diperbaiki dari sector hulu-hilir pertanian baru kemudian dilihat apakah petani memang berdaya secara kuantitatif dan kualitatif.

Artinya bahwa pidato seorang presiden seharusnya lebih didasarkan pada data. Tidak sembarangan membuat pernyataan, sehingga masyarakat tidak melakukan feed back negative, karena memang terjadi di dunia nyata. Terbukti dilapangan, sehingga feed back dari masyarakat menjadi positif ke pemerintahan Presdien Prabowo.

Namun pada faktanya, Pak Prabowo tidak peduli dengan feed back masyarakatnya. Blundernya terlalu banyak dengan kata kunci; “saya dapat laporan”, tetapi Pak Prabowo tidak melakukan verifikasi, triangulasi, validasi, ataupun evaluasi sungguh-sungguh terhadap laporan-laporan yang diterimanya.

Pada kasus penyediaan lapangan kerja oleh MBG (makan bergizi gratis), belum ada jaminan akan adanya investasi jangka panjang. Bagaimana pun juga MBG bertumpu pada APBN. Jikalau APBN diputus maka MBG berhenti seketika. Artinya lapangan kerja yang dibikin tidak berkelanjutan dalam waktu jangka menengah apalagi jangka panjang. Padahal penciptaan lapangan kerja mestinya berasal dari investasi yang kemudian itu membuat kemandirian bagi institusi dan masyarakat yang bekerja di institusi tersebut.

Dengan demikian mestinya Pak Presiden tidak “mengahmbur-hamburkan” APBN untuk sesuatu yang bersifat konsumtif. Berbeda dengan ketika menjadi investasi, maka ada peluang besar untuk membuat kemajuan bagi bangsa dan Negara ke depannya. Namun apa pun yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo selalu ada harapan untuk kebaikan bangsa di masa depan. Bisa jadi demikian walaupun tidak signifikan.